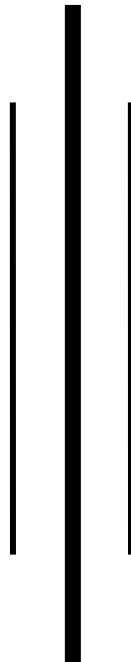




**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJiP)
KECAMATAN KERTEK**



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmad dan hidayah kepada kita semua, sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2019.

LKJiP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, sebagai bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kertek Tahun 2019 ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan usebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Beberapa kendala dalam penyusunan LKJiP, yaitu masih kurangnya data dukung dan kelengkapan dokumen sehingga mempengaruhi proses dan kualitas dokumen, namun dengan keterbatasan tersebut semoga dokumen LKJiP yang tersusun dapat menjadi gambaran hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kertek.

Kami mengharap kritik, masukan dan saran untuk penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 untuk penyempurnaan laporan di tahun yang akan datang.

Kertek, Januari 2020

Camat Kertek

MUHAMMAD SAID, S.Sos. MM.
NIP. 19660208 198709 1 001

DAFTAR ISI

BAB	I	PENDAHULUAN
		LATAR BELAKANG STRUKTUR ORGANISASI SISTIMATIKA PENYAJIAN
BAB	II	PERENCANAAN KINERJA
		A. VISI DAN MISI B. TUJUAN DAN SASARAN C. PENETAPAN KENERJA
BAB	III	AKUNTABILITAS KINERJA
		A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
BAB	IV	PENUTUP
		LAMPIRAN – LAMPIRAN
		a. Perjanjian Kinerja Kecamatan Kertek Tahun 2019
		b. Penetapan Kinerja Kecamatan Kertek 2019

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah khususnya atas penggunaan anggarannya wajib dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), bentuk implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai bagian dari Kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, sedangkan menurut Perda Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Tugas dan Fungsi Jabatan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo tanggal 22 Juli 2008, Kecamatan dalam hal ini Camat mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan atau Kelurahan serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah (UU No.32 Tahun 2004).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 ini sebagai gambaran dalam pengukuran atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kertek.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo, Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai bagian dari Kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, sedangkan menurut Perda Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Tugas dan Fungsi Jabatan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penyusunan LKJiP

- a. Untuk mengukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- b. Sebagai upaya perbaikan yang berkelanjutan bagi SKPD Kecamatan Kertek untuk meningkatkan kinerjanya.

2. Tujuan Penyusunan LKJiP

- a. Bahan informasi berupa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dimanfaatkan.
- b. Penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

D. ASPEK STRATEGI ORGANISASI

1. Visi dan Misi

Untuk mencapai sasaran Pembangunan di Kecamatan Kertek pada akhir Tahun 2021 seperti ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021 sebagai mana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021 dengan visi ; Terwujudnya Wonosobo Bersatu untuk maju, Mandiri dan Sejahtera untuk semua.

Profesional mengandung makna *good governance* (supremasi hukum, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan), kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparat Kecamatan dan Desa, pemahaman aturan dan prosedur, sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan.

Responsif, mengandung makna daya tanggap atas permasalahan dan tuntutan masyarakat, cepat bertindak dan cepat menyesuaikan dengan

lingkungan dan tuntutan, aspiratif dan akomodatif, kondusifitas wilayah, dan keinginan untuk memberi pelayanan terbaik (pelayanan prima)

Efektif, mengandung makna peran fungsi koordinatif dan sinergisitas/sinkronisasi.

Inovatif, mengandung makna penggalan dan pengembangan potensi sumberdaya, perencanaan dan pemberdayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Kertek Tahu 2016 – 2021, maka ditetapkan 4 misi yaitu :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas aparatur pemerintah.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Mewujudkan peningkatan fungsi koordinasi tingkat
4. Mengembangkan potensi dan kearifan lokal.

2. Letak Geografis.

Kecamatan Kertek merupakan salah satu Kecamatan di antara 15 Kecamatan di Kabupaten Wonosobo yang terletak di sebelah Timur dari Ibukota Kabupaten Wonosobo dengan jarak 9 Km ke jalan jalur Kabupaten Temanggung.

Batas wilayah di sebelah utara yaitu Kabupaten Temanggung, di sebelah timur dengan Kecamatan Kalikajar, sebelah selatan dengan Kecamatan Selomerto dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wonosobo.

Luas Kecamatan Kertek adalah 6.214.366 hektar dengan jumlah penduduk 79.280 jiwa terdiri penduduk laki-laki sebanyak 40.372 dan perempuan 38.908 jiwa, terdiri 19 Desa dan 2 kelurahan dengan jumlah 761 RT, 154 RW dan 75 Dusun.

3. Pembagian Wilayah Organisasi.

a. Tugas dan Fungsi Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, tugas dan uraian tugas Administrasi adalah sebagai berikut :

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat selaku pimpinan wilayah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan.
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkungannya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.
- h. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati.
- i. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan.
- j. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kelompok jabatan fungsional.
- k. Pelaksanaan pembinaan pegawai.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Camat selaku Kepala Wilayah dibantu oleh :

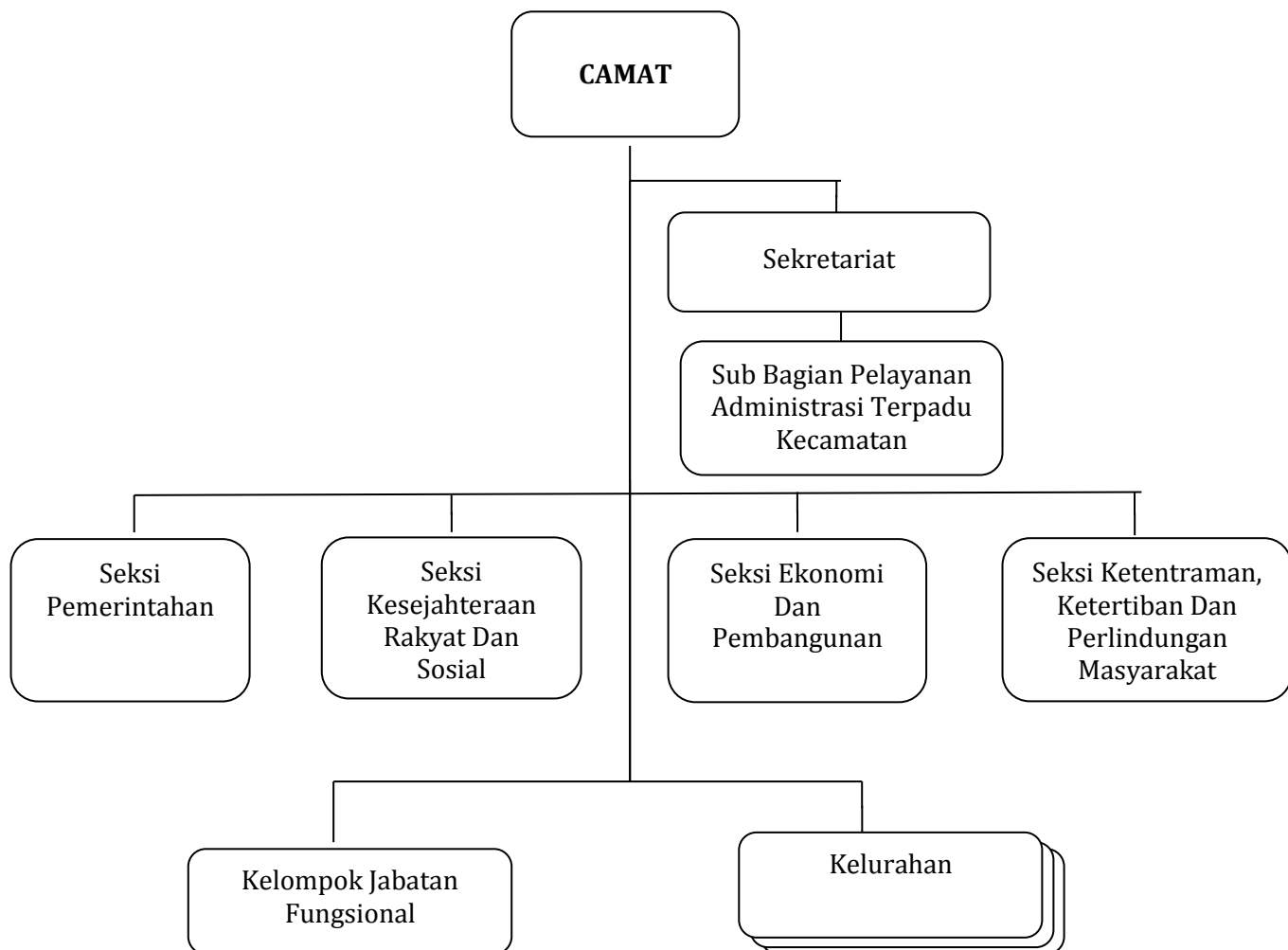
1. Sekretaris Camat
2. Kasi Pemerintahan
3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
4. Kasi Pelayanan, Administrasi Terpadu
5. Kasi Ketentraman dan ketertiban umum
6. Dan Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Kantor Kecamatan kertek dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI

TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 56 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka digambarkan Bagan struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah unit Kecamatan sebagai berikut



Dari bagan di atas dapat disimpulkan struktur susunan organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah unit Kecamatan Kertek terdiri dari :

- a. Camat Kertek
- b. Sekretaris Kecamatan Kertek terdiri
 - Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- e. Seksi Trantibun

Berdasarkan data sub bagian kepegawaian jumlah pejabat dan pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Kertek sebanyak (tiga puluh enam) orang dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 1

Data Jumlah Jabatan Struktural Dan Pelaksana Di Kantor Camat Kertek Tahun 2019

No	Kedudukan dalam organisasi	Jenis Ke- lamin		Jumla h
		L	P	
1	2	3	4	5
1.	Camat Kertek	1		1
2.	Sekretaris Camat	1		1
	-Staf Administrasi	1	2	3
.	-Bendahara Pengeluaran	1	1	2
3.	Kasub ubag Paten			1
	-Staf Sekertaris	2		2
	-Operator KTP	1		1
4.	- Kasi Pemerintahan	1		1
	- Staf Administrasi		2	2
5.	- Kepala Kesrasos	1		1
	- Staf Administrasi	2		2
6.	- Kepala Ekbang	1		1
	- Staf Administrasi	2	1	3
7.	- Kepala Trantibun	1	-	1
	- Staf Administrasi		1	1
	- Satpol PP	2		2
8.	Kepala Kelurahan Kertek	1		1
	Sekretaris Lurah			-
	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan		1	1
	Staf Administrasi	2	1	3
9.	Kepala Kelurahan Wringinanom	1		1
	Sekretaris Lurah	1		1
	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan		1	1

	Staf Administrasi	3		3
	JUMLAH	26	10	36

Sumber : Kantor Kecamatan Kertek

Untuk Jabatan Struktural Kecamatan Kertek sudah terisi seluruhnya.

Sedangkan sarana prasarana pendukung yang ada dan dimiliki oleh Kantor Kecamatan Kertek meliputi :

Tabel 2
Jumlah Pegawai menurut Status, Pangkat dan Golongan
(Per Januari 2019)

No	Status Kepegawaian	Gol. Ruang	Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Kertek										
			Camat	Sekretaris Kec.	Kasi Pemerintahan	Kasi Ekbang	Kasi Kessos	Kasi Trantib	Subag Paten	Kelurahan	Sekur	Staf	
	Pembina Tk I	IV/b											
	Pembina	IV/a	1	1				1					
	Penata Tk. I	III/d			1	1				1			
	Penata	III/c							1	1	6	1	1
	Penata Muda Tk. I	III/b											1
	Penata Muda	III/a											2
	Pengatur Tk. I	II/d											9
	Pengatur	II/c											5
	Pengatur Muda Tk. I	II/b											1
	Pengatur Muda	II/a											1
	Juru Tk. I	I/d											1
	Juru	I/c											
	Juru Muda Tk. I	I/b											
	Juru Muda	I/a											
2	Honorarium Daerah												
	Total		1	1	1	1	1	1	1	1	7	1	21
													36

Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Kecamatan Kertek sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat :

- 1 orang berpendidikan S-2
- 12 orang berpendidikan S-1
- 0 orang berpendidikan D-4
- 2 orang berpendidikan D-3
- 18 orang berpendidikan SMA/Sederajat
- 3 orang berpendidikan SMP/Sederajat
- 1 orang berpendidikan SD/Sederajat

Gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Kertek menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan.

PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

Permasalahan utama yang terjadi Issu Strategis yang dihadapi di Kecamatan Kertek :

1. Keterbatasan jumlah pegawai di Kecamatan Kertek sehingga terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas.
2. Sistem perencanaan dan penganggaran belum berjalan optimal dan belum berbasis kinerja.
3. Adanya perubahan/mutasi jabatan mengakibatkan tidak sinkronnya perencanaan dari RPJMD, Renstra, Renja dan PK yang berakibat pada tidak selarasnya kegiatan.

SISTIMATIKA PENYAJIAN

Laporan ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB	I	PENDAHULUAN
		A. Latar Belakang
		B. Landasan Hukum
		C. Maksud dan Tujuan
		D. Aspek Strategis Organisasi
		1. Visi dan Misi
		2. Letak Geografi
		3. Pembagian Wilayah Organisasi
		4. Organisasi Perangkat Daerah
		E. Permasalahan Utama Organisasi
		F. Sistematika
BAB	II	PERENCANAAN KINERJA
BAB	III	AKUNTABILITAS KINERJA
		A. Capaian Kinerja Organisasi
		B. Realisasi Anggaran
BAB	IV	PENUTUP
		LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kantor Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo yang telah menyusun Rencana Strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu periode 2016-2021 dan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar tahun 1945, Pemerintah Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan efisiensi dan efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehingga tugas2 di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik. Untuk dapat melaksanakan tugas2 di bidang Pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakatan di tingkat kecamatan Kertek menetapkan Rencana Strategis 2016-2021.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang RPJP Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 – 2015, untuk memberikan arah kebijakan dan tujuan dalam mewujudkan cita –cita dan tujuan daerah yang disesuaikan dengan visi misi Kepala Daerah terpilih periode tahun 2016 – 2021 dan juga arah kebijakan nasional.

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut maka unit Satuan Kerja Peangkat Daerah Kecamatan kertek berkewajiban menyusun Rencana Skala Prioritas Program – Program pembangunan di wilayah Kecamatan Kertek selama lima tahun yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kertek tahun 2016 – 2021, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan landasan menentukan arah kebijakan pembangunan selama lima tahun kedepan.

Guna mengimplementasikan pembangunan jangka waktu satu tahun, maka perlu dibuatkan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahunan yang proses penyusunannya disamping merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kecamatan yang disusun dan digali melalui tahapan Musrenbang tingkat Desa dengan for-

mat pendekatan bottom up juga berdasarkan Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kertek tahun 2019 telah ditetapkan melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan selanjutnya dibawa ke forum SKPD dan Musrenbang tingkat Kabupaten Wonosobo untuk dibahas.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara mengamanatkan bahwa Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rangkuman prioritas usulan program kegiatan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

A. VISI DAN MISI

VISI

“ Mewujudkan Kecamatan Kertek lebih maju dan sejahtera melalui optimalisasi Program Pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor dalam rangka ikut mewujudkan visi Kabupaten Wonosobo di Kecamatan Kertek ”

MISI

- ✓ Memberikan pelayanan yang efektif dan efisien
- ✓ Menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat
- ✓ Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penunjang pembangunan
- ✓ Memberdayakan potensi kecamatan dalam rangka peningkatan PAD
- ✓ Peningkatan infrastruktur dan perbaikan sarana dan prasarana kerja yang ada

Penjelasan Visi di atas merupakan suatu gambaran masa depan yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, khususnya Kecamatan Kertek sampai dengan tahun 2019. Kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten berkewajiban mensukseskan program-program yang ada di wilayahnya

B. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan mensukseskan program Pendidikan

2. Terwujudnya peningkatan pelayanan Pemerintah Kecamatan kepada masyarakat
3. Turujudnya Pembangunan di segala bidang, dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang disertai dengan partisipasi aktif masyarakat.
4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat, guna menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

SASARAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan asministrasi publik
2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan
3. Meningkatnya kuwalitas perencanaan di tingkatKecamatan
4. Optimalisasi capaian target PBB
5. Meningkatnya tertib administrasi perijinan bangunan
6. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan Desa

C. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas Kecamatan Kertek menyusun Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kertek tahun 2019

TABEL 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan kualitas layanan administrasi publik	Rata – rata lama penyelesaian pengurusan dokumen kependudukan (KK / KTP) di Kantor Kecamatan	1 hari
		Rata – rata lama penyelesaian dokumen legalisasi di Kantor Kecamatan	10 menit
		Prosentase kerusakan blangko KK/KTP	2 %
2	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	Prosentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP	95 %
		Prosentase kepemilikan KK	95 %

		Prosentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran	85 %
3	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan	Prosentase hasil Musrenbang di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	40%
4	Optimalisasi capaian PBB	Prosentase capaian PBB	100 %
5	Meningkatkan tertib administrasi perijinan bangunan	Prosentase capaian target retribusi IMB	100 %
6	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa	Prosentase desa yang menyelesaikan laporan tepat waktu dan sesuai ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> - Laporan kependudukan - Pertanggungjawaban APBDes - LPPD - LKPJ - Buku Wajib Desa 	100 % 100 % 100 % 100 % 80 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) unit Kantor Kecamatan Kertek tahun 2018 telah melaksanakan berbagai kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Layanan Administrasi Publik.

a. Rata - rata lama penyelesaian pengurusan dokumen kependudukan (KTP/KK) di Kecamatan Kertek

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Pada indikator ini targetnya adalah 8 menit dan dengan berbagai terobosan, maka realisasi kinerja yang dapat dicapai 5 menit.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir di banding tahun 2019 maka penyelesaian pengurusan dokumen kependudukan (KTP/KK) mengalami peningkatan, dari target 8 menit, di tahun 2019 ini tercapai capaian kinerja 5 menit, jika dibandingkan tahun 2016, 2017, 2018, maka capaian kinerja mengalami kemajuan yang cukup berarti.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Pada dokumen perencanaan strategis SKPD, sebenarnya punya keinginan pengurusan dokumen kependudukan cukup 2-5 menit bisa selesai namun demikian kadang beberapa kendala masih ada, seperti: persyaratan kurang, sinyal dari capil terganggu, alat kantor rusak dll.

Analisis keberhasilan/kegagalan dan alternatif solusi
Realisasi target ini didukung dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana ruang pelayanan dan pengadaan Kemajuan, sehingga di tahun 2019 cukup 2 menit, sudah bisa terlayani.

Analisis keberhasilan/kegagalan dan alternatif solusi
Prosentase kinerja ini didukung oleh adanya kebijakan pimpinan tentang penempatan orang PNS yang khusus menangani pelayanan legalisasi ini, baik yang melayani maupun yang tanda tangan, kecuali untuk urusan keuangan, kepegawaian dan pertanahan, ini masih menjadi wewenang Camat.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Untuk mempertahankan capaian kinerja ini, maka meeting staf dan racor internal menjadi kegiatan rutin yang biasa dilakukan, guna mengukur keberhasilan dan kendala, sehingga secara bersama-sama bisa diatasi secepat mungkin.

b. Prosentase kerusakan blangko KTP/KK

perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target yang dicanangkan 2%, dan hasil yang dicapai sebesar 2%

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Prosentase kerusakan blangko KTP/KK cukup baik, dari target 2% dapat terealisasi penurunan menjadi 2%, dibanding 3 tahun terakhir.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.
Diperencanaan jangka menengah memang ditarget tidak ada sama sekali kerusakan blangko alias 0%, namun demikian karena kendala kerja pasti ada, maka target 0% harus dilakukan secara bertahap. Komputer yang tersendiri, terpisah dengan penggunaan komputer seksi/bagian lain, sehingga pelayanan KTP/KK tidak terganggu oleh kegiatan lain.

Analisis Program/Kegagalan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Untuk mengurangi kendala dalam rangka pencapaian kinerja, maka program/kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2019 ini antara lain:

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, dengan jenis kegiatan: Bintek peningkatan kinerja perangkat desa dan kelembagaan desa, dengan indikator kinerja pening-

katan kinerja perangkat desa didalam melayani masyarakat secara umum, baik sisi administrasi maupun pelayanan umum lainnya. Kegiatan lain yang menunjang adalah adanya belanja modal pengadaan komputer sebanyak 2 unit, yang mana sudah dilaksanakan pada tahun 2019 yang lalu

c. Rata-rata lama penyelesaian dokumen legalisasi diKecamatan Kertek

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Target kinerja yang ingin dicapai adalah 4 menit, namun realisasinya 2 menit, sehingga target kinerja dapat terlampaui.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2019 ini mengalami peningkatan capaian kinerja, dimana pada tahun 2018, 4 menit, pada tahun 2018 menjadi 2 menit, jika dibandingkan 3 tahun terakhir, maka kepengurusan dokumen legalisasi mengalami banyak peningkatan yang signifikan.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun dengan target jangka menengah.
Pada target jangka menengah pengurusan dokumen legalisasi sebenarnya 5 menit

Analisis keberhasilan/kegagalan dan alternatif solusi

Pencapaian target kinerja ini didukung oleh penempatan oleh 2 orang karyawan yang khusus menangani pelayanan KTP/KK serta operator komputer.

analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Untuk menurunkan kerusakan blangko KTP/KK ini, maka meeting staf dan rakor internal menjadi kegiatan rutin yang biasa dilakukan, guna mengukur keberhasilan dan kendala, sehingga secara bersama – sama bisa diatasi secepat mungkin.

d. Prosentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP

Perbandingan antara target dan realisasi kerja tahun ini.
Pada indikator ini ditargetkan sebesar 100 % dengan mengusulkan kepada Disdukcapil dan kependudukan Kabupaten

Wonosobo untuk mengadakan jemput bola pembuatan KTP/KK, maka realisasi yang dapat kami capai sebesar 98,7 % juga, sehingga target dapat dilaksanakan sesuai rencana yang ada.

- # Perbandingan anatara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Dibandingkan dengan tahun terahir, maka kepemilikan KTP teris mengalami peningkatan, seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas kependudukan.
- # Perbandingan realisasi kinerkja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sesuai program Pemerintah Pusat tentang e-KTP maka target jangka menengah SKPD, realisasi target trentunya sudah cukup bagus yaitu 98,7 % dari wajib jumlah KTP yang ada.
- # Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan alternatif solusi
Adanya kegiatan jemput bola oleh Disdukcapil Wonosobo bersama bagian KTP bagian Paten menjadi langkah baik, agar target kinerja dapat tercapai
- # Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.
Program Pemerintah Pusat dan Kabupaten dalam hal ini Disdukcapil tentunya akan sangat membantu bagi capaian targrt kinerja yang ada di Kecamatan, disamping kegiatan yang dilakukan oleh SKPD itu sendiri, berupa sosialisasi dan prembinaan kependudukan.

2. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan.

a. Prosentase kepemilikan KK

- # Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Sesuai target yang direncanakan sebesar 100 % dapat direalisasikan sebesar 90 %, sehingga target kinerja belum dapat tercapai.
- # Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Dibandingkan beberapa tahun terakhir maka jumlah waiib KK yang memiliki KK mengalami peningkatan, jika di tahun 2016

target 100 % realisasi 80 % maka di tahun 2016 mencapai 90 %.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Sesuai program Pemerintah Pusat tentang e-KTP, maka dari target jangka menengah AKPD, Realisasi target tentunya sudah cukup bagus yaitu 90 % dari jumlah wajib KTP yang ada.

Analisis keberhasilan/kegagalan dan alternatif solusi.

Upaya pemenuhan target ini di dukung oleh adanya kegiatan jemput bola ke desa oleh Dincapil dan Kependudukan Kabupaten wonosobo bersama dengan Bagian Paten.

b. Prosentase kepemilikan akte kelahiran

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Sesuai target yang direncanakan sebesar 100% dengan jemput bola maka realisasinya sebesar 89,04%, sehingga target terlampui

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Dibandingkan beberapa tahun terakhir maka jumlah wajib Akte Kelahiran yang memiliki akte kelahiran mengalami peningkatan, jika di tahun 2018 target 100 % realisasi 80 % maka di tahun 2019 mencapai 90 %. Dari jumlah penduduk Wajib Akta di Kecamatan Kertek

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dibanding target jangka menengah SKPD, tentunya mengalami banyak peningkatan, ini seiring dengan progra dan kegiatan yang dilakukan oleh dinas terkait di tingkat Kabupaten.

Analisis keberhasilan/kegagalan dan alternatif solusi. Upaya pemenuhan target ini didukung oleh adanya kegiatan jemput bola ke desa oleh Dincapil dan Kependudukan Kabupaten Wonosobo beberapa tahun terakhir

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Kegiatan njemput bola ke desa oleh Dincapil dan Kependudukan Kabupaten Wonosobo, masih menjadi kegiatan yang seharusnya dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.

3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

- # Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Target kinerja 50%, maka ralisasinya baru 30% dari semua usulan kegiatan. Hasil Musrenbang Kecamatan tahun 2018 yang lalu
- # Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Dibandingkan tahun 2018 yang lalu dan beberapa tahun terakhir, maka dokumen skala prioritas Kecamatan (DSP) yang ditindak lanjuti oleh anggaran APBN, APBD.I maupun APBD.II, Mengalami Peningkatan, meskipun sebenarnya hal ini terkait dengan kegiatan luncuran tahun sebelumnya
- # Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah di dalam dokumen RPJM, SKPD 2016-2021 target yang dicanangkan adalah 100%, tetapi behubung sistem butgetting dan situasi perpolitikan yang ada, masih banyak hasil Musrenbang Kecamatan yang tidak terkover keseluruhan, keterbatasan anggaran, juga masih menjadi kendala terealisasinya target kinerja, sehingga di tahun 2019 target 50% baru bisa tercapai 35%.
- # Analisis keberhasilan/kegagalan dan alternatif solusi sistem butgetting dan situasi perpolitikan yang ada, masih banyak hasil Musrenbang Kecamatan yang tidak terkover keseluruhan, keterbatasan anggaran, juga masih menjadi kendala terealisasinya target kinerja.
- # Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Namun demikian perencanaan yang berkualitas sesuai kebutuhan SKPD dan Desa/Kelurahan melalui kegiatan Musrenbang Kecamatan tahun 2019 masih tetap dilaksanakan, dengan anggaran Rp. 20.000.000,- bagaimanapun dengan musrenbang Kecamatan yang terprogram, berharap adanya daftar skala prioritas usulan yang baik, dan benar-benar rencana dari bawah.

4. Optimalisasi Capaian Pemasukan PBB.

- # Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun ini, Pada sasaran ini tiap tahun SKPD Kecamatan Kertek selalu

mencapai target yang ditentukan, yaitu lunas 100%, untuk tahun 2019

- # Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Dibandingkan beberapa tahun terakhir sampai dengan 2019, maka realisasi target kinerja mencapai 100%
- # Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah lunas 100% tiap tahun adalah target kinerja yang selalu dicanangkan, bahkan lunas paling awal di Kabupaten Wonosobo
- # Analisis keberhasilan/kegagalan dan alternatif solusi. Untuk mengatasi kegagalan sebenarnya ada semacam tindakan khusus sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan.
- # Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Kegiatan Rakor Kepala Desa dan Paguyuban Kades sebenarnya menjadi forum resmi yang cukup baik dalam rangka memberi pembinaan kepada Kepala Desa, selain program Intensifikasi langsung ke wajib pajak di masing-masing desa, khususnya WP yang membandel.

5. Meningkatnya tertib Administrasi Perijinan Bangunan (IMB)

- # Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun ini, Pada sasaran ini kami menargetkan 100% realisasinya bisa mencapai 100% sampai akhir tahun 2019, melebihi target yang telah direncanakan
- # Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sudah beberapa tahun terakhir target retribusi IMB selalu melebihi target kinerja yang ada.
- # Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah didalam perencanaan jangka menengah, setiap bangunan harus ber IMB, baik melalui pemutihan maupun ijin pembangunan baru, meskipun secara bertahap, ini tidak lepas dari program KPPT sendiri selalu leading sektornya.
- # Analisis keberhasilan / kegagalan dan alternatif solusi keberhasilan mencapai 100% dari target yang ada, disebabkan oleh banyaknya bangunan tahun 2019 yang mengajukan IMB, selain kesadaran masyarakat sendiri, khususnya yang mendi-rikan bangunan.

- # Analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan sosial dan jemput bola ke obyek pemilik bangunan menjadi faktor penentu keberhasilan ini

6. Meningkatnya Administrasi Desa

- # Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini indikator yang ditetapkan adalah prosentase desa yang dapat menyelesaikan laporan rutin dan administrasi desa tepat waktu sesuai ketentuan yang ada, terisi atas : Laporan kependudukan, pertanggung jawaban APBdes, LPPD, LKPJ, dan Pengisian buku administrasi desa. Hasil kinerja dapat dicapai 100% dari target, sehingga terpenuhi, termasuk buku administrasi desa, meskipun khusus administrasi desa belum diisi secara rutin, meskipun sebenarnya hanya beberapa desa saja yang sudah aktif, rutin dan baik didalam pengelolaan administrasinya.
- # Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dengan pembinaan dan bintek yang terus dilakukan, maka realisasi kinerja terus mengalami peningkatan dan kemajuan.
- # Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah, target jangka menengah kita adalah, hendaknya semua desa administrasinya baik dan benar
- # Analisis keberhasilan / kegagalan dan alternatif solusi penggunaan kepada perangkat desa, meeting secdes tiap senin, bintek, kiranya menjadi faktor keberhasilan pencapaian target kinerja.
- # Analisis program, kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, dengan jenis kegiatan: bintek peningkatan kinerja perangkat desa dan kelembagaan desa, dengan indikator kinerja peningkatan kinerja perangkat desa didalam melayani masyarakat secara umum baik sisi administrasi maupun pelayanan umum lainnya.

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

1. Sasaran :

Meningkatnya layanan administrasi publik

Indikator pertama:

Rata-rata lama penyelesaian pengurusan dokumen kependudukan (KK,KTP) diKecamatan Kertek

Target : 8 menit

Realisasi : 5 menit

Kendala :

Masih adanya pemohon yang membawa persyaratan dari desa yang kurang lengkap, sehingga yang bersangkutan harus kembali lagi untuk melengkapi persyaratan.

Pemecahan masalah / kendala :

- a. Lewat rakor sekdes diminta untuk memahami syarat-syarat pelayanan administrasi publik, agar masyarakat tidak wira-wiri pulang pergi, karena kurang persyaratan.
- b. Peningkatan sarana prasarana ruang pelayanan dan penambahan komputer.

Jumlah anggaran : 0,00

Indikator kedua :

Rata-rata lama penyelesaian dokumen legalisasi dikecamatan kertek.

Target : 4 menit

Realisasi : 2 menit

Kendala :

Hampir tidak ada kendala berarti pada capaian kinerja pada indikator ini, semua lancar-lancar saja.

Pengurangan kendala :

Penempatan 1 orang PNS yang khusus menangani layanan legalisasi ini.

Jumlah anggaran : 0,00

Indikator ketiga :

Prosentase kerusakan blangko KTP/KK

Target : 2%

Realisasi : 2%

Kendala :

Human error dan kesalahan teknis dari capil (sinyal) dan kerusakan sarana kerja (komputer dan printer) masih menjadi kendala utama, sehingga untuk menghilangkan sama sekali kerusakan blangko KK masih sulit dilakukan. Sampai dengan akhir tahun 2019.

Pemecahan masalah :

Dengan penempatan 2 orang karyawan yang khusus menangani / menangani KTP/KK serta 2 orang operator komputer khusus KK/KTP.

Jumlah anggaran : 0,00

Indikator keempat :

Prosentase penduduk wajib KTP yang sudah memiliki KTP

Target : 100%

Realisasi : 87%

Kendala :

Belum 100% target dan realisasi disebabkan oleh penduduk yang keluar daerah/ jawa dan penduduk jompo/ sakit yang enggan pulang serta enggan foto KTP karena menganggap sudah tidak berguna lagi karena sudah tua, disamping tidak memahami pentingnya dokumen kependudukan.

Pemecahan masalah :

Dengan melakukan jemput bola kedesa guna pelayanan langsung kepada penduduk yang belum ber KTP, sosialisasi dan pembinaan.

Jumlah anggaran : 0,00

2. Sasaran :

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan

Indikator pertama :

Prosentase kepemilikan KK

Target : 100%

Realisasi: 90%

Kendala dan pemecahan masalah :

Sama seperti kendala dan pemecahan masalah pada indikator prosentase kepemilikan KTP.

Indikator kedua :

Prosentase kepemilikan akta kelahiran

Target : 100%

Realisasi: 90%

Kendala :

Salah satu kendala yang muncul adalah belum semua warga masyarakat memahami akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran, akta kelahiran dianggap hal yang biasa dan ringan saja, sehingga saat kelahiran anak tidak semua langsung didaftarkan untuk mendapatkan akta kelahiran.

Pemecahan masalah :

Dengan adanya kebijakan hampir semua instansi tentang akta kelahiran menjadi salah satu syarat wajib administrasi, maka tahun 2019 kami akan meningkatkan target dan realisasi ke 100%

Jumlah anggaran : 0,00

Keterangan :

Khusus pelayanan akta kelahiran ditangani langsung oleh disduk capil wonosobo.

3. Sasaran :

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Indikator :

Prosentase hasil musrembang kecamatan yang ditindak lanjuti oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten.

Target : 50%

Realisasi: 30%

Kendala :

Masih rendahnya target dan realisasi, disebabkan oleh kondisi sistem politik dan budgeting yang menurut kami belum baik sama sekali, sehingga kadang Musrembangdes / Kel,Kec maupun Kabupaten hanya merupakan formalitas belaka. Namun demikian anggaran yang terbatas, juga menjadi faktor penting lain yang juga menjadikan tidak semua usulan dan kebutuhan serta merta terpenuhi di tahun berkenaan harus bertahap, sesuai prioritas dan kondisi keuangan yang ada. Hal lain yng tidak kalah penting adalah rendahnya swadaya masyarakat didalam mendapingi setiap bantuan/kegiatan pemerintah.

Pemecahan masalah :

- Sistem politik dan budgeting harus diperbaiki.
- Perlu adanya Perda tentang sistem perencanaan Pembangunan daerah.
- Swadaya masyarakat perlu ditingkatkan dan disadarkan, bahwa bantuan pemerintah hanya merupakan stimulan.
- Buku RPJMDes harus menjadi patokan utama di dalam merencanakan pembangunan, sehingga sistem skala prioritas menjadi hal yang harus didahulukan.
- Merubah jadwal Musrembangdes, Kec dan Kabupaten dari Januari/Pebruari menjadi November/Desember, ini akan berpengaruh besar pada pelaksanaan anggaran APBD/APBN/APBD.1, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan tepat pada akhir tahun anggaran/bahkan pada pertengahan tahun anggaran.

Jumlah anggaran : Rp 25.000.000,00

4. Sasaran :

Optimilisasi pencapaian PBB

Indikator :

Prosentase capaian target PBB

Target : 100%

Realisasi: 90%

Kendala :

Karena tahun 2018 tidak bisa mencapai realisasi 100%, maka perlu ada langkah khusus dalam rangka penganan dan intensifikasi pemasukan PBB di tahun 2019 yang akan datang, sehingga benar-benar pemasukan 100%, sesuai target yang direncanakan, untuk mencapai 100% tersebut, maka perlu pemecahan masalah, yaitu :

- SPPT bermasalah dibetulkan secara masal/menyeluruh se-Kabupaten Wonosobo.
- Sosialisasi kedesa/masyarakat ditingkatkan lagi, oleh pemerintah desa/kelurahan tentang kedudukan, fungsi dan manfaat PBB bagi pembangunan daerah.
- Adanya sanksi yang jelas bagi wajib pajak yang tidak melunasi kewajiban pajaknya, dengan sanksi lokal (jenis sanksi di masing-masing desa/kel mungkin bisa berbeda-beda, sesuai karakteristik masyarakat dan budaya yang ada di desa/kel setempat).

Jumlah anggaran : 0,00

5. Sasaran :

Meningkatnya tertib administrasi perijinan bangunan (IMB)

Indikator :

Prosentase capaian target retribusiIMB

Target : 100%

Realisasi :120%

Keberhasilan sesuai target IMB ini diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya IMB.
2. Banyaknya kegiatan pembangunan fisik, yang mana membutuhkan IMB.
3. Kewajiban kreditor untuk melampirkan IMB saat mengajukan kredit disebuah lembaga perbankan/keuangan.

Kendala :

- Penegakan aturan/perundang-undangan masih kurang optimal.

Pemecahan masalah :

- Sosialisasi kepada masyarakat perlu dioptimalkan lagi
- Petugas/KPPT melakukan aktifitas jemput bola ke-masyarakat desa/kelurahan agar lebih di maksimalkan, melalui program pemutihan IMB di kabupaten Wonosobo.
- Optimalisasi penegakan hukum secara jelas bagi bangunan yang tidak ber-IBM.

Jumlah anggaran : 0,00

6. Sasaran :

Meningkatnya tertib administrasi desa

Indikator :

Prosentase desa yang menyelesaikan laporan/permintaan data tepat waktu dan sesuai ketentuan, terdiri atas: laporan kependudukan, pertanggung jawaban APBDes, LPPD, LKPJ dan SPJ ADD.

Target : 100%

Realisasi: 100%

Khusus laporan permintaan data realisasi masih 90% dan khusus SPJ ADD90% sedangkan

Kendalanya :

Khusus APBdes, LPPD dan LKPJ karena sangat erat berhubungan dengan dana AD/dana Desa, maka tidak ada kendala berarti, semua desa tepat waktu dan sesuai ketentuan. Namun untuk laporan rutin/data dan buku administrasi desa masih belum optimal, tidak rutin dikerjakan dan tidak tepat waktu dalam memenuhi permintaan data yang dibutuhkan.

Pemecahan masalah :

Melalui meeting sekdes/staf setiap hari senin, kami berharap kinerja sekdes selaku koordinator administrasi tingkat desa bisa lebih baik lagi, sehingga semua jenis administrasi/data dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, selain bintek dan pelatihan yang secara berkala dilaksanakan.

Jumlah anggaran : 0,00

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 dan Penjabaran APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2019 Satuan Kerja Perangkat Daerah unit Kantor Kecamatan Kertek untuk kegiatan belanja langsung mendapat alokasi dana sebesar Rp. 5.404.068.333,00,-Realisasi Rp.4.927.845.831,00,- sisa pagu anggaran Rp. 476.222.502,00,-

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN :

Kecamatan Kertek telah melakukan fungsi perangkat daerah di Kecamatan dengan capaian sebesar 99,47 %, hal ini bisa dikategorikan baik.

Faktor yang berpengaruh di Kecamatan Kertek :

- a. Tata kerja jabatan struktural sebagaimana dalam organisasi Kecamatan berjalan dengan baik
- b. Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Camat, Sekretaris Camat , masing – masing seksi dan sub seksi.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

SARAN :

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka untuk langkah perbaikan kedepan perlu adanya :

1. Dalam pencapaian kinerja perlu adanya standarisasi ukuran kinerja dari hasil kajian, analisis dan evaluasi sehingga ada keseragaman dalam penilaian kinerja seluruh SKPD
2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran indikator kinerja sehingga nantinya visi dan misi ditetapkan akan tercapai.
3. Agar Implementasi Sistim LAKIP dapat efektif, perlu adanya senergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan berbanding lurus dengan output maupun outcome.

Kertek, Januari 2019

Camat Kertek

MUHAMMAD SAID, S.Sos. MM.
NIP. 19660208 198709 1 001

